



Atas Opini WTP

Pemkab Badung Raih Penghargaan Kemenkeu

ATAS komitmen dan keberhasilan Kabupaten Badung melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan senantiasa berpedoman kepada prinsip tata kelola keuangan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel atas LKPD Tahun 2014, Pemkab Badung meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Kini atas prestasi tersebut, giliran pemerintah pusat memberikan apresiasi melalui Kementerian Keuangan RI. Apresiasi tersebut ditunjukkan dengan pemberian penghargaan kepada Pemkab Badung yang diterima Penjabat Bupati Badung Ir. I Nyoman Harry Yudha Saka, M.M. dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Jumat (2/10) lalu.

Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat negara. Hadir juga dalam acara tersebut Asisten Administrasi Umum Pemkab Badung I Gst. Ngr. Oka Darmawan, Kepala Inspektorat Luh Suryaniti,

Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa, dan Sekretaris Bappeda dan Litbang Agus Aryawan. Pemerintah pusat memberi penghargaan kepada 207 entitas pelaporan 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten, 50 pemerintah kota yang berhasil menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan opini audit WTP.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro diterima langsung Penjabat Bupati Badung Harry Yudha Saka. Penghargaan serupa juga diterima oleh 62 kementerian dan lembaga setingkat, 26 pemprov dan 50 pemkot yang laporan keuangannya di tahun anggaran 2014 meraih WTP dari BPK.

Menteri Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya mengatakan, penghargaan

ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan lembaga setingkat serta pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Khususnya yang mampu meraih opini WTP dari BPK.

Penjabat Bupati Badung Harry Yudha Saka mengungkapkan, bahwa penghargaan ini patut disyukuri dan merupakan hasil kerja keras seluruh SKPD Pemkab Badung dan menjadi sebuah kebanggaan bagi daerah dan Pemkab Badung yang merupakan penyemangat untuk tetap bekerja secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Dengan diperolehnya penghargaan WTP ini, wajib bagi Pemkab Badung untuk mempertahankan dan ini tentu menjadi komitmen Pemkab Badung," tegasnya. (ad270)



PENGHARGAAN - Penjabat Bupati Badung Ir. I Nyoman Harry Yudha Saka, M.M. menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Jumat (2/10) lalu.

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal : 3



Dipenjara 15 Tahun,

Uang Pengganti Rp 42 Miliar

PT Naikkan Hukuman

Wayan Candra

Denpasar (Bali Post) -

Di saat Kejati Bali merekomendasikan SP3 pada Ni Made Anggara Juni Sari, S.T., M.Si., I Dewa Ayu Budhi Arini dan I Nengah Meregek, yang sebelumnya dinyatakan sebagai tersangka atas kasus korupsi Dermaga Gunaksa, nasib berbeda justru diterima mantan bosnya, Wayan Candra. Vonis 12 tahun penjara yang diterima mantan bupati dua periode di Bumi Serombotan itu di Pengadilan Tipikor Denpasar, pendapat berbeda justru diberikan oleh pengadilan di tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Oleh PT Denpasar, Wayan Candra justru dihukum lebih berat, yakni dihukum sesuai tuntutan jaksa. Di tingkat banding, Candra divonis hukuman 15 tahun penjara.

Dikonfirmasi Minggu (4/10) kemarin, salah satu tim kuasa hukumnya, Warsa T Bhuna, mengatakan memang benar putusan pengadilan tingkat banding menghukum Candra 15 tahun penjara. "Hukuman di tingkat banding sama persis dengan tuntutan jaksa," jelas Warsa T. Bhuna.

Jadi, selain hukuman 15 tahun dan denda yang sempat dikurangi, uang penggantian juga drastis naik. Sebelumnya, JPU Made Pasek menuntut supaya terdakwa dihukum 15 tahun penjara, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan. Terdakwa juga dituntut untuk membayar denda Rp 500 juta, subsidi enam

bulan kurungan. Made Pasek dkk. juga menuntut pidana tambahan pada terdakwa Candra dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 42.628.467.605,33 dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukuman tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun,"untut jaksa kala itu.

Sementara dalam vonisnya yang dibacakan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, Wayan Candra yang didakwa atas kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi divonis

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal : 2



Sambungan - - -

hukuman penjara selama 12 tahun. Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni pidana korupsi secara bersama-sama, tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang secara berlanjut. Selain hukuman 12 tahun, terdakwa membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan. Uang pengganti yang awalnya Rp 42 miliar itu tidak dikabulkan hakim. Majelis hakim justru menghukum supaya terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.197.000.000 atau Rp 1,19 miliar. Angka tersebut amatlah jauh berbeda antara keyakinan jaksa dan hakim, yakni dari Rp 42 miliar menjadi Rp 1,19 miliar. Uang pengganti itu adalah uang pengganti tanah atas nama Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budi Arini. Dengan ketentuan, kata hakim, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang untuk mengganti uang pengganti. "Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," putus hakim.

Lantas, apa langkah tim ad-

vokat Wayan Candra melihat putusan banding naik dan menyalami tuntutan jaksa? Warsa T Bhuana via ponsel mengaku sudah berkoordinasi dengan Candra. Hanya, dia belum mau mengambil sikap apa-apa, karena setelah melakukan koordinasi, Wayan Candra, kata Warsa T Bhuana, akan mengambil langkah sendiri. Apakah itu berarti kuasa hukumnya diputus? "Tidak. Hanya Pak Candra mengaku kasihan sama kami. Jadi Pak Candra yang akan mengambil keputusan nanti. Ini kan sifatnya data saja. Jika nanti kami dimintai data, tentu kami siapkan. Biarkan Pak Candra berkoordinasi dulu dengan pihak keluarganya," sebut Warsa.

Sementara itu, pascadikeluarkannya rekomendasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tiga kasus korupsi dan dua kasus pencucian uang dalam kasus Dermaga Gunaksa, Klungkung, kini banyak mencuat isu tak sedap. Pasalnya, status tersangka itu sudah berlangsung sejak lama. Akmal Kodrat, jaksa senior di Pidsus Kejati Bali, berdalih bahwa tiga orang yang pernah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Anggara Juni Sari, hanya diperalat oleh mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. "Dia



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

hanya diperalat Pak Candra," katanya saat itu.

Selain itu, setelah keluar rekomendasi tiga orang itu, masih ada tiga tersangka lainnya yang nasibnya belum jelas. Ketiga tersangka merupakan pembeli tanah di Dermaga Gunaksa, Klungkung yang menerima ganti rugi dari pemerintah saat dilakukan pembebasan lahan yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan dari terpidana lainnya.

Ketiga tersangka tersebut yaitu IB Susila, I Gusti Ayu Ardani dan Ni Luh Nyoman Hendrawati. Status ketiga tersangka ini sempat ditanyakan kepada jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Akmal Kodrat usai menyampaikan keluarnya lima rekomendasi SP3 untuk kasus Dermaga Gunaksa, Kamis (17/9) lalu. Namun, Akmal mengatakan tidak tahu perkembangan ketiga tersangka tersebut. Rekomendasi SP3 ini dikeluarkan untuk tiga kasus korupsi Dermaga Gunaksa untuk Ni Made Anggara Juni Sari, I Dewa Ayu Budhi Arini dan I Nengah Meregek. (kmb37)

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015
Hal : 2



Opini WTP

Jembrana Raih Penghargaan Menkeu

OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI Perwakilan Bali terhadap Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 beberapa bulan lalu, mendapat perhatian Kementerian Keuangan RI. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015, Jumat (2/10) di Gedung Dhana-pala Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro memberikan penghargaan kepada Bupati Jembrana I Putu Artha atas keberhasilannya menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2014 dengan capaian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian.

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan didampingi Wakil Menteri Keuangan Madiasmo tersebut diterima Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani. Menurut Menkeu Bambang Brojonegoro, upaya untuk meningkatkan komitmen bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mensinergikan pengelolaan keuangan negara harus terus ditingkatkan. Sebanyak 287 entitas berhak atas penghargaan tersebut, yang meliputi 62 kementerian lembaga, 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten dan 50 pemerintah kota.

Rakernas yang digelar Kemenkeu tersebut, mengambil tema Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia. Dengan tema tersebut menurut Bambang Brojonegoro, sebagai upaya bersama untuk

meningkatkan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola keuangan Negara, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang baik, transparan dan akuntabel melalui implementasi dan pelaporan keuangan berbasis akruwal.

Ditambahkannya, penerapan akuntansi berbasis akruwal diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. "Hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah terutama dalam era perekonomian yang semakin global saat ini," kata

Menkeu.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani menyebutkan, penerapan akuntansi berbasis akruwal juga menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, tidak sekadar informasi kas, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Koriani menambahkan, selain penyerahan penghargaan dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan sidang pleno untuk membahas implementasi akuntansi pemerintah berbasis akruwal, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan manajemen keuangan pemerintah serta strategi implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akruwal. (ad275)



PENGHARGAAN - Mewakili Bupati Jembrana, Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani menerima penghargaan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015
 Hal : 12



PENGHARGAAN - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat menerima penghargaan dari Menetri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro, Jumat (2/10).

Sukses Wujudkan Wajar Tanpa Pengecualian Pemkab Buleleng Raih Penghargaan Menkeu

PEMKAB Buleleng berhasil merebut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pengelolaan keuangan pemerintah. Sukses itu mendapat apresiasi tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Apresiasi positif itu ditunjukkan dengan pemberian penghargaan kepada Pemkab Buleleng. Penghargaan itu diterima Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang diserahkan serangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015, di Gedung Dana-pala, Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (2/10) pekan lalu.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro. Acara itu disaksikan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, dan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara. Penghargaan serupa juga diterima 62 Kementerian dan Lembaga Setingkat, 26 Pemprov, dan 50 Pemkot yang laporan keuangannya di tahun anggaran 2014 meraih WTP dari BPK. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian dan lembaga setingkat, serta pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Khususnya bagi daerah yang meraih opini WTP dari BPK.

Atas penghargaan yang diterima itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengaku bangga dengan prestasi yang diraih. Keberhasilan itu diyakini berkat kerja keras seluruh jajaran Pemkab Buleleng dan juga dukungan masyarakat Buleleng. Karena itu, Bupati PAS mengajak semua pihak agar

tidak berpuas diri. Namun ke depan, seluruh jajaran di Pemkab Buleleng diminta terus bekerja dengan baik, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang diraih sebelumnya. "Penghargaan ini patut disyukuri. Ini adalah bukti sebuah kebanggaan. Keberhasilan ini bagi Buleleng sendiri, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam tata kelola keuangan daerah," ujarnya.

Sebelumnya Kabupaten Buleleng berhasil meningkatkan kinerja dalam pengelolaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan mendapat predikat (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2014, yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, Juni 2015 lalu. Opini WTP ini sebagai hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Bali, diterima Bupati Putu Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di kantor BPK-RI Perwakilan Bali.

Bupati Suradnyana usai menerima laporan mengatakan, keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan sejarah dan penantian panjang sejak era reformasi. Keberhasilan ini diraih berkat kerja keras dan komitmen tinggi dari jajaran pemerintah SKPD yang mampu melakukan tata kelola keuangan dengan baik. "Puji syukur impian mewujudkan WTP terwujud. Sukses ini merupakan motivasi bagi kami di pemerintah agar senantiasa mengawal visi dan konsep *Good Governance*," ujar Bupati PAS. (ad276)

Edisi : Senin, 5 Oktober 2015

Hal : 11